



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PESIKAIAN KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Alrira Fitri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : alrira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah informan berjumlah 44 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata total 123 berarti berada pada interval Cukup baik, Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dengan keseluruhan indikator yang diujikan yakni keseluruhan sudah Cukup baik, hanya saja pemerintahan desa semua mendapat undangan menghadiri rapat, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya rapat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik

Abstract

This research was conducted in Pesikaian Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the community participates in physical development in Pesikaian Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. the formulation of the problem in this research is How is Community Participation in Physical Development in Pesikaian Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used is Simple Random Sampling, namely taking sample members from the population randomly without regard to strata in the population, where the number of informants is 44 people. Analysis of the data used is descriptive quantitative, which analyzes the data obtained from the results of distributing questionnaires. The results of the distribution of the questionnaires show Community Participation in Physical Development in Pesikaian Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency, resulting in a total average value of 123, which means it is in a fairly good interval, as well as field observations which show that it is indeed good enough. Kuantan Singingi Regency, with all the indicators tested, namely that the whole was quite good, it's just that all village administrations received invitations to attend meetings, so the community did not know there was a meeting.

Keywords : Community Participation in Physical Development



1. PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah mewacanakan untuk melakukan pembangunan Nasional secara merata. Bukti dari dedikasi pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata ini telah dimulai dari struktur terkecil dari organisasi pemerintahan yaitu dari Pemerintahan Desa. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara Mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara mengakui adanya masyarakat adat atau desa yang kemudian diberikan kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Desa sebagai sasaran akhir pembangunan merupakan pendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Kepala Desa sebagai pemimpin dan perangnya harus dapat membangkitkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar tercapainya *good governance* mutlak dilaksanakan. Saat ini, masyarakat telah memiliki kesempatan yang luas untuk mengutarakan dan menyalurkan pendapatnya. Pada perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik itu yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan, hingga kabupaten/ kota. Selain daripada itu masyarakat juga dapat dilibatkan pada proses berlangsungnya kegiatan pembangunan, hingga pengawasan setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan juga masyarakat ikut berpartisipasi, agar dalam pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam pemerintahan daerah, sehingga partisipasinya merupakan aspek penentu bagi berlangsung atau tidaknya otonomi daerah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara luas yang menyangkut segala aspek.

Melaksanakan Pembangunan Desa bukan hanya tugas dari Kepala Desa, tetapi merupakan tugas dari seluruh warga desa. Pembangunan Desa akan sulit terlaksana apabila tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Meskipun Pemerintah tengah gencar mensosialisasikan dana Desa yang ditujukan agar pembangunan tiap desa meningkat namun tetap saja apabila masyarakatnya acuh tak acuh maka dana desa yang telah diberikan pun akan sulit direalisasikan sesuai peruntukannya.

Di satu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan Perluasan Partisipasi.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif. Di dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kepala Desa, didalam memberikan motivasi agar warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan diberikan dengan bentuk memberi arahan, binaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pembangunan desa bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Setiap Pembangunan harus melibatkan masyarakat, Perencanaan pembangunan haruslah melibatkan masyarakat, harus ada partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan untuk dapat merealisasikan program pembangunan. Musrenbang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan secara partisipatif untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa/kampung. Dalam musrenbang kampung, pemerintah kampung dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan.

Sebelum dilaksanakan musrenbang Desa terlebih dahulu diselenggarakan pra musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga ataupun Dusun. Masing masing RT mengidentifikasi kebutuhan dari masing masing RT, namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan tidak ada pra musrenbang yang dilakukan di Desa Pesikaian, tidak ada kebutuhan yang jelas untuk dibawa dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kampung/desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting dikarenakan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang menegetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembanguan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat.

Peranan masyarakat sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengkombinasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. dari hasil observsi penulis dilapangan menemukan beberapa fenomena : Partisipasi masyarakat masih kurang dalam Pembangunan fisik di desa Pesikaian, hal ini terlihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, karena tidak semua mendapat undangan menghadiri rapat, sehinggga masyarakat tidak mengetahui adanya rapat. Sebagai akibat dari kurang aktifnya masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan sehingga daftar prioritas rencana pembangunan Desa Pesikaian yang seharusnya diajukan masukan langsung oleh masyarakat namun diambil alih oleh para elit pemerintahan desa untuk menentukan pembangunan apa yang akan di laksanakan di desa, selain itu pada saat dilaksanakannya pembangunan Fisik didesa, masyarakat terkesan kurang peduli untuk memantau pembangunan tersebut.



Berdasarkan Hasil Observasi penulis dilapangan tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa Pesikaian, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya peranan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa Pesikaian ini, dan peneliti mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut Suwarno Mengemukakan Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis yuntuk di dokumentasikan, agar mudah menemukannya bila di perlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerical work*), jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi (dalam Afifudin, 2015 : 3)

Administrasi menurut arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa inggris). dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti definisi administrasi dalam arti luas, yaitu :

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Afifudin, 2015 : 5)

Menurut Sondang P. Siagian, mengartikan Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaanyang pada umumnya dilakukan oleh dua oarang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Afifudin, 2015 : 5)

Menurut Soerjano Soekanto secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (dalam Syafie, 2013 : 3).

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang namanya negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat pelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapa saja yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya, Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara atau dari suatu pemerintahan dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut (dalam Syafie, 2013:22).

Menurut Miriam Budiardjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (*control*) monopolistis dan kekuasaan yang sah (dalam Syafie, 2013:29).

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat. organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Administrasi ada dua macam yaitu: administarsi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber (Siagian, 2012 : 38)

Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggara. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut (Siagian, 2012 : 65)

2.1.2 Teori/Konsep Manajemen

Manajemen merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Organisasi bisa dikatakan berhasil, apabila sudah mengatur anggota-anggotanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi serta penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (dalam Tohardi, 2012 : 10)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2013 : 16).

Manajemen (*management*) adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa esensi dari manajemen adalah kegiatan bekerja yang dilakukan oleh orang lain guna mencapai tujuan. Melalui manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan Manajemen merupakan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian. (dalam Hasibuan, 2012 : 3).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati



sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2017 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.

Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

2.1.3 Teori /Konsep Kepemimpinan

Pemimpin adalah seseorang yan memiliki bawahan atau pengikut untuk satu tujuan dan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dimilikinya. Sedangkan kepemimpinan telah dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan dibawah ini : (Edison, dkk 2017 : 89)

1. Schermerhorn : kepemimpinan adalah proses meginspirasi orang lain untuk bekerja keras guna menyelesaikan tugas-tugas penting.
2. Gary Yukl : kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.



3. Jeff Madura : kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain demi mencapai sasaran (dalam Edison, dkk 2017 : 89)

Dari berbagai literatur tentang kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin (*leader*) adalah orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan (*leadership*). Adapun istilah pimpinan mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hirarki tertentu dalam suatu organisasi formal maupun non formal. Pemimpin organisasi ini tentu saja mempunyai bawahan, yang karena kedudukannya seorang pimpinan mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawab. Istilah lain di lingkungan birokrasi yang memiliki makna yang sama dengan pimpinan yakni atasan atau kepala. Kedua istilah ini tersebut juga lazim disebut pejabat yakni seseorang yang diangkat untuk menduduki atau memangku suatu jabatan tertentu sesuai hirarki organisasi. Oleh karena itu, mengacu pada pengertian tersebut, maka pejabat sudah pasti sebagai pimpinan, tapi belum tentu dapat berperan sebagai pemimpin. Dalam suatu organisasi birokrasi yang baik, tentu saja diharapkan seorang pejabat dapat juga berperan sebagai pemimpin. Sejalan dengan pemahaman itu, fenomena kepemimpinan ini tentu saja bersifat lebih luas dibandingkan pimpinan. Pemimpin dapat diaplikasikan dalam kontek organisasi maupun non organisasi, karena seorang pemimpin dapat berpengaruh tanpa harus diberi kewenangan formal, seperti contohnya tokoh masyarakat, pemuka agama, alim ulama dan sebagainya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu:

1. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama.

2.1.4 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapatkelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formalmaupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan salingmemberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasiterdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesamaanggota masyarakat.

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. (Sumaryadi: 2013 : 46)

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata “partisipasi” dan “patisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam bangunan.



Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Pengertian partisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Sedangkan menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith (dalam Nasution, 2014 : 16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga factor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Yadav mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil –hasil pembangunan. (dalam Mardikanto dan Subianto, 2019 : 82-84)

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguna sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu. Pemanfaatan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2.1.5 Teori /Konsep Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Siagian (2012:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2014:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2013 : 20)

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Tinjauan umum Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum RKPD, dan Musrenbang Daerah, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang.

Konsep yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan sistem top down menuju pengelolaan bottom up, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan daerah.

Musrenbang bertujuan mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD. Dokumen berisikan (a) arah kebijakan pembangunan daerah; (b) arah program kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Rencana Kerja SKPD; (c) kerangka ekonomi makro dan keuangan; (d) prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya; (e) rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat; (f) alokasi anggaran untuk ADD

Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam



pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses Musrenbang memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. (Rostanti dan Suherman, 2008 : 05)

Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang terdiri atas sebagai berikut :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan. Musrenbang tingkat Desa adalah Masyarakat Desa mulai dari Ketua RT/RW, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Pemuda, Pengrajin, dan berbagai lapisan masyarakat desa yang memiliki kebutuhan riil dapat berpartisipasi dalam melakukan kebijakan pembangunan bersama pemerintah desa.
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyeleksi program pembangunan di berbagai desa yang ada di Kecamatan tersebut. Delegasi dari setiap desa dapat mengajukan program yang telah disepakati dari musyawarah pembangunan tingkat desa. Pemerintah Kecamatan bertugas sebagai fasilitator dapat memberikan arahan yang profesional kepada setiap delegasi dari pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa. Program yang disepakati harus berdasarkan atas analisis yang objektif sehingga keputusan diambil sesuai sasaran.
- c. Musyawarah Perencanaan Pemabngunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten.

Musrenbang tingkat Kabupaten adalah musyawarah pemabngunan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun apa yang menjadi hasil dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan. Pemerintah daerah harus bisa memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan. Dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membentuk prosedur Musrenbang dalam bentuk perda tentang partisipasi dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran yang menekankan pada kewajiban keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga diharapkan substansi dari RKPD, KUA, PPA, dan sehingga menjadi APBD yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

2.1.6 Teori Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014)



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (KBBI, 2013 : 2)

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah, Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).



Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2015 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil sebaran kuesioner secara rata-rata adalah 123 dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 88 - 132. selain dari hasil sebaran kuesioner yang memperoleh rata-rata 123 yang berarti Cukup Baik, juga dibuktikan dengan observasi penulis dilapangan yang mana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan Fisik di desa pesikaian memang sudah cukup baik, terlihat dengan jika masyarakat mendapatkan undangan untuk rapat masyarakat akan datang untuk berpartisipasi dalam rapat atau musyawarah Pembangunan desa, masyarakat ikut serta menghadiri rapat pembangunan desa, meski Keaktifan masyarakat dalam mengemukakan pendapat saat musyawarah Pembangunan desa memang kurang baik, terlihat dengan masyarakat yang kurang aktif saat rapat, karena masyarakat kebanyakan tidak banyak bersuara memberikan saran atau membantah saran yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan di desa pesikaian memang sudah cukup baik, terlihat dengan masyarakat pun mau berkontribusi dengan uang, meski tidak semua masyarakat memiliki materi berlebih sehingga masyarakat hanya bisa berkontribusi dengan tenaga demi pembangunan desa, dan masyarakat pesikaian baik dalam berkontribusi dengan tenaga untuk pembangunan desa, serta masyarakat mau gotong royong.

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan di desa pesikaian memang sudah cukup baik, terlihat dengan jika adanya ketidaksesuaian dalam jalannya pembangunan maka masyarakat akan melakukan kritik/koreksi kepada pihak terkait dalam jalannya pembangunan masyarakat juga memberikan saran penilaian dan menyampaikan sebagai bahan evaluasi dari masyarakat terhadap jalannya pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di desa pesikaian memang sudah cukup baik, terlihat dengan Pemanfaatan hasil pembangunan desa oleh masyarakat memang sudah cukup baik, terlihat dengan masyarakat sangat memanfaatkan hasil pembangunan desa dan membantu masyarakat dengan pembangunan tersebut, masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan fisik di desa Pesikaian memang sudah cukup baik, masyarakat merasa cukup puas atas pembangunan di desa pesikaian sehingga masyarakat juga cukup baik dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan dikarenakan masyarakat merasakan manfaatnya dari pembangunan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata total 123 berarti berada pada interval Cukup baik, Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dengan keseluruhan indikator yang diujikan yakni keseluruhan sudah Cukup baik, hanya saja pemerintahan desa semua mendapat undangan menghadiri rapat, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya rapat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Saudara penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi serta Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2014. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- H. R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM. YKPN
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. UMM Press : Malang
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi 2022
- Rostanti Maya, Nandang Suherman dkk, 2014. *Mewujudkan Anggaran Pro Rakyat Miskin: Manual Advokasi Masyarakat Sipil Dalam Siklus Anggaran Daerah*.
- Salam, Darma Setyawan. 2017. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sondang P. Siagian, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2013, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tohardi, Ahmad 2012. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung
- Yuswar, Zainul Basri & Mulyadi Subri. 2014. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sumber lain :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa